

# KEDEWASAAN ELIT POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 (Suatu Studi Di Desa Sea Satu)

Anette D.L Polimpung<sup>1</sup>  
[Anettedlp25@gmail.com](mailto:Anettedlp25@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu wujud dari proses demokrasi yakni dengan dilaksanakannya kegiatan pemilu dimana mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia untuk bebas memilih, misalnya mengikuti kegiatan politik melalui proses pelaksanaan pemilihan legislatif. Agar proses demokrasi berjalan baik diperlukan kematangan atau kedewasaan dari seluruh pemangku kepentingan yang akan terlibat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), artikel ini akan mendeskripsikan kematangan atau kedewasaan elit politik di desa Sea Satu dalam partisipasi politik pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019. Kedewasaan politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2009) tentang partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan kedewasaan elit politik di Desa Sea Satu dilihat dari sisi pengetahuan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun masih ada kelemahan yaitu belum memiliki kesiapan dalam menerima kekalahan.

**Kata Kunci: Kedewasaan Politik; Elit Politik**

## ABSTRACT

*Indonesia is a country that adheres to a democratic system. One manifestation of the democratic process is the implementation of election activities which involve all Indonesian people to freely choose, for example participating in political activities through the process of implementing legislative elections. In order for the democratic process to run well, maturity or maturity is needed from all stakeholders who will be involved. Using a qualitative method (Sugiyono, 2014), this article will describe the maturity or maturity of the political elite in the village of Sea Satu in political participation in the 2019 Legislative Election (Pileg). Political maturity will be studied using the approach proposed by Mirriam Budiardjo (2009) about political participation. The results of the study show that the maturity of the political elite in Sea Satu Village in terms of knowledge can be said to be quite good, but there are still weaknesses, namely not having the readiness to accept defeat.*

**Keywords: Political Maturity; Political Elite**

## PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu wujud dari proses demokrasi yakni dengan dilaksanakannya kegiatan pemilu dimana mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia untuk bebas memilih, misalnya mengikuti kegiatan politik melalui proses pelaksanaan pemilihan legislatif. Dalam kegiatan pemilihan umum, perlunya kematangan demokrasi atau kesadaran politik atau faktor penentu kedewasaan terlebih melihat kepemimpinan elit-elit politik, di dalamnya sejumlah tokoh masyarakat, BPD, aparatur desa dan sebagainya, sehingga seluruh aktifitas kegiatan pemilu berjalan baik demi kepentingan tujuan bersama.

Kedewasaan politik menjadi prakondisi yang diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan demokrasi yang berkualitas. Tanpa kedewasaan politik, demokrasi akan

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

<sup>2</sup> korespondensi

mengalami pengkerdilan. Untuk itu pertumbuhan demokrasi perlu didukung dengan gizi yang memadai agar para elit dan massa memiliki kesadaran dan kedewasaan politik dalam berpartisipasi. Gizi ini hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan politik, suatu proses pembelajaran agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Mariana, 2008).

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi, karena melalui pemilu, aspirasi rakyat untuk menentukan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan (Respationo, 2013:357).

Fenomena unik dan menarik berkenaan dengan Pemilihan Legislatif 2019 yang hadir selama perhelatan kompetisi akbar tersebut tidak pernah selesai untuk dikaji dan diperbincangkan di sudut-sudut ruang publik. Minimal perbincangan tentang pemilu 2019 bisa menjadi bahan pelajaran bagi khalayak umum sekaligus medium merefleksikan kembali indikator kedewasaan berdemokrasi. Contoh kasus menurut Dirno, produk pemilu legislatif tahun 2019 lalu. "Ada banyak caleg yang justru kecewa dengan hasil perolehan suaranya yang jeblok bahkan tidak bisa meraih tiket DPRD, padahal, hampir semua sudut-sudut perkotaan terpampang baliho pribadi dan bendera parpol yang mengusungnya. (kutipan dari berita online manadolive, 2020).

Kalah-menang adalah hasil sebuah kompetisi dan proses alami yang dapat terjadi pada siapa pun. Persoalan yang sesungguhnya bukan terletak pada hasil yang akan kita peroleh, tetapi bagaimana kesiapan mental kita menerima hasil tersebut. Kesiapan mental menjadi hal yang urgen dalam beraktivitas. Tanpa kesiapan mental yang baik, emosi kita akan terombang ambing. Fondasi diri menjadi rapuh sehingga terkadang saat menerima hasil yang jauh dari harapan, emosi menjadi sulit terkendali (Sumartono Mulyodiharjo, 2010:29).

Untuk menghindari konflik yang merugikan rakyat, para politisi Indonesia harus banyak belajar bersikap dewasa dalam kompetisi politik. Kedewasaan berpolitik berarti menunjukkan kematangan demokrasi. Kematangan itulah yang nantinya mampu menopang pilar-pilar demokrasi Indonesia agar bisa berdiri tegak dan kokoh. (Safri Mubah, 2008:256).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kedewasaan**

Kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa. Kedewasaan dapat diartikan kematangan dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengambil suatu keputusan dengan bijaksana. Faktor penentu keadaan kedewasaan salah satunya dilihat dari perilaku. Perilaku merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Perilaku yang dilihat adalah sikap, emosi, nilai, kekuasaan, yakni sebagai berikut:

- a. Sikap  
Sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Komponen perilaku dari sebuah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).
- b. Emosi  
Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).
- c. Nilai  
Nilai merupakan elemen yang mendasari cara berpikir, tindakan, dan sikap seseorang yang dipetik dari beragam pengalaman kehidupan seseorang (Arifin, 2018:28).
- d. Kekuasaan  
Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. (kutipan berita kompas, Vanya Putri, 2021).

Seseorang dikatakan mencapai kedewasaan atau kematangan secara politik dalam arti menjadi warganegara yang siap mengemban peran-peran yang normal dalam kehidupan politik, yaitu yang mengenal hak dan kewajibannya sebagai warganegara terhadap sistem politiknya (Zulfikri Suleman, 2010:20).

Sederhananya, kedewasaan politik merupakan sikap saling memahami, sikap menjunjung tinggi toleransi sehingga masyarakat juga tidak terpancing isu-isu SARA yang mengancam persatuan bangsa, (kutipan berita, Delly Ferdian, 2016).

Pada hal sejatinya politik pada awalnya merupakan kegiatan warganegara untuk membicarakan kebaikan bersama atau kepentingan publik yang dilandasi oleh nilai-nilai moral. Berpolitik merupakan sebuah aktifitas pengabdian politik yang berpijak pada kehendak umum demi kesejahteraan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan kelompok dan individu. Dengan berpolitik secara elegan akan menumbuhkan kedewasaan dan kematangan demokrasi, kutipan jurnal "*Menjaga Etika Dalam Berpolitik*" (Budiyono, 2019:51).

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa kedewasaan berdemokrasi pada setiap keterlibatan perilaku dilihat dengan saksama mengenai sikap, emosi, nilai dan sebagainya dalam situasi dan kondisi kehidupan politik dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi memajukan kesejahteraan rakyat merupakan hal yang diperlukan dan ditanamkan dalam setiap warganegara.

## **B. Partisipasi Politik**

### **- Pengertian**

Partisipasi secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *capere* artinya mengambil, yang berarti "mengambil bagian", partisipasi dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* yang berarti "mengambil bagian/mengambil peranan", partisipasi dalam bahasa indonesia mempunyai makna yang sama yakni mengambil bagian atau turut serta. Politik secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota. Secara harafiah, partisipasi politik berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, (www.wikipedia.com).

Partisipasi politik oleh masyarakat dari elit politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh dalam kebijakan (Miriam Budiardjo dalam jurnal Pradana, 2019:198).

Selanjutnya dengan pemahaman (Akbar Kaelola, 2009:222) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik.

Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada, Artinya, setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik (Elly Setiady, dkk. 2013:127).

Yang dimaksudkan dalam kegiatan politik ialah pemilu, Pemilu Legislatif merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu negara dengan memberikan suara secara langsung dalam bilik suara. Pemilu legislatif juga sebagai sarana untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, serta penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, kutipan jurnal (Fadhlain Said, dkk, 2014:41).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah bahwa setiap orang mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik daripada orang lain termasuk para ahli elite politik yang membuat keputusan (Ardial, 2010:64).

### - **Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi menurut pemahaman (Putra, 2012:46), adalah bentuk partisipasi politik sangat beragam, mulai yang dilakukan secara terorganisir (kesadaran membangun sebuah negara), spontan, individual, kolektif, tersusun rapi, *sporadic*, secara damai, menggunakan kekerasan, legal, dan tidak legal hingga partisipasi yang tidak efektif. Dari pandangan tersebut jelas tergambar bahwa partisipasi politik adalah segala bentuk ekspresi masyarakat yang ditujukan untuk mengubah atau mempertahankan sebuah kebijakan pemerintah dengan cara apapun.

Selain itu bentuk partisipasi politik lainnya, menurut Gabriel Almond dalam (Sitepu, 2012:101) adalah: (1). Partisipasi Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. (2). Partisipasi Politik Non-Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga dalam mengambil bagian dalam kegiatan politik, seperti mengikuti dan mengambil bagian dalam kegiatan pemilihan legislatif tahun 2019 salah satunya dengan cara memberikan kontribusi sebagai warga politik demi mewujudkan kepentingan bersama. Dan secara umum partisipasi dilihat dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional dan lain sebagainya.

## **C. Elit Politik**

### - **Pengertian**

Elite secara etimologi, elite berasal dari bahasa latin *eligere* yang berarti memilih, elite dalam bahasa Indonesia yang berarti orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok.

Elit politik merupakan sekelompok orang dalam jumlah yang kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan yang biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas. Baik buruknya kekuasaan itu tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut digunakan, artinya baik buruknya senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat tersebut terlebih dahulu. (Soekanto dalam Budi Pramono, 2020:80).

Elit politik adalah individu-individu yang berhasil memiliki bagian terbanyak dari nilai-nilai dikarenakan kecakapannya, serta sifat-sifat kepribadian mereka dan karena kelebihan tersebut maka mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan elit politik menjadi suatu hal yang biasa dan sangat wajar sebagai bagian dari partisipasi mereka sebagai insan politik (Tawakkal Baharuddin, 2017:92).

Elit politik merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Secara operasional para elite politik atau elite penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elite politik (Gaetano Mosca dalam Nurhamin Usman, 2015:216).

Kepemimpinan, para elit politik ketika pertarungan dalam pemilu dapat menerima kekalahan dengan santun, ketika kampanye tidak menyudutkan orang lain, tidak memberikan uang maupun materi kepada masyarakat, serta tidak melakukan serangan fajar. Jika para elit politik dapat menunjukkan beberapa ciri-ciri di atas, niscaya kedepan kedewasaan dalam berpolitik dapat terwujud walaupun melalui proses panjang. Sebaliknya, jika para elit politik masih berkuat seputar hal tersebut di atas, sistem politik Indonesia bakal sulit mencapai konsensus tinggi yang diharapkan banyak orang (Juri, Suparno, 2020:126).

### - **Karakter Elit**

Sifat ataupun karakter seorang elit sangat penting dimiliki. Hal tersebut paling tidak disebabkan dua faktor :

1. Seorang elit sebagai pemimpin hendaknya mampu merangkul semua elemen masyarakat supaya mereka tidak merasa "dianaktirikan".
2. Karena seorang elit politik seringkali juga sebagai pemimpin, tentu ia harus ingat bahwa misi pemimpin adalah untuk melayani, bukan dilayani. Oleh karena itu, sifat yang paling

pantas dimiliki seorang elit politik adalah menjaga komunikasi dengan masyarakat secara baik dan kontinue. Elit politik tidak hanya datang ketika membutuhkan dukungan masyarakat atau menjelang pemilu. Namun, harus hadir disetiap kondisi masyarakat. Keadaan demikian tentu menjadi sebuah keistimewaan, sebab tidak semua elit politik “mau” melakukannya (Juri, Suparno, 2020:152).

#### - **Identifikasi Kategori Elit**

(S.P Varma, 2010:200), masyarakat terdiri dua kelas yakni: *Pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*Governing Elit*) dan elit yang tidak memerintah (*Non Governing Elit*). *Kedua*, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat pada umumnya, dan lain sebagainya.

Selanjutnya menurut Syamsudin (dalam jurnal Farisi, 2017), menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik ada beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Metode Posisi. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi. Elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode Pengaruh. Elit Politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu, orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa elit politik merupakan sekumpulan warga yang biasanya mempunyai kewenangan yang memerintah dan tidak memerintah dalam masyarakat. Dan keterlibatan elit politik menjadi suatu hal yang sangat wajar sebagai bagian dari partisipasi mereka sebagai insan politik. Elit politik dalam penulisan ini adalah kepala lingkungan, mewarteng, tokoh agama, BPD, dan pengurus ranting partai.

#### **D. Hubungan Kedewasaan Elit Politik Dengan Partisipasi Politik**

Sesuai paham kedaulatannya rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Artinya berbagai hal pengetahuan dan kesadaran hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik (Julianto, dkk 2019:12).

Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Juga bisa dikatakan sebagai salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya (Priangani, 2019:80).

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik, oleh kutipan jurnal (Nana Darna, 2019:79).

Tentunya dalam hal ini kedewasaan dalam pemilu seperti yang diliput dalam artikel (Fadilah, 2019) apapun hasilnya, siapapun yang terpilih, itulah keputusan yang harus kita hormati bersama. Semua elemen pun harus saling bahu membahu mengawal pemerintahan selanjutnya, didukung jika kebijakannya berpihak pada rakyat dan dikritik jika menyimpang dari janji-janji yang sudah diteriakkan. Inilah kedewasaan berpolitik yang semestinya dicontohkan oleh para elite kita.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari. Berbeda suku, dan agama adalah sesuatu hal yang biasa. Berbeda pilihan dalam menentukan calon kepala daerah pun harus disikapi dengan kedewasaan berpolitik, tidak dapat dipungkiri sering terjadi gesekan-gesekan ditengah masyarakat disaat menjelang pemilu. Ketika orang lain memiliki pilihan berbeda dengan kita, seringkali masyarakat orang yang berbeda pilihan itu adalah lawan. Pemikiran seperti inilah yang sering ditemui dalam suasana menjelang pemilu, dan pola pikir seperti itu adalah tidak benar dan harus diubah tentunya dengan sikap kedewasaan berpolitik kita, dalam kutipan jurnal (Birdie, Wiesje, Trintje, 2018:17).

Hasil dari penelitian jurnal (Askar, 2020:11) memberikan gambaran tentang penyebab terjadinya konflik dan permasalahan seputaran pemilu dan pilkada. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan melibatkan beberapa elemen dalam masyarakat baik KPU, partai politik, mahasiswa maupun lembaga kepemudaan serta kebudayaan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai pemilih sehingga dengan demikian kontestasi perpolitikan dapat berjalan damai dan jujur sesuai amanah UU tentang Pemilu serta meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam hal pemilihan pemimpin kedepannya.

Kedewasaan berdemokrasi para politisi kita perlu dipertanyakan lagi. Sangat kentara bahwa kebanyakan politisi hanya menginginkan kemenangan dan berkuasa tanpa memedulikan esensi dari kekuasaan tersebut. Esensi dari kekuasaan ialah kemauan untuk melayani publik dengan sepenuh hati. Jika para politisi berpegang teguh pada niat mulia tersebut, maka menangkalah dalam kompetisi politik tidak menjadi persoalan.

Dalam persaingan politik, menang ataupun kalah seharusnya sudah menjadi hal yang wajar, jika saja individu yang berkaitan memiliki jiwa dan pikiran yang sehat. Realitas persaingan politik akan menjadikan kepahitan bagi mereka yang kalah (Lusia Astrika, 2014:1).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, hubungan antara kedewasaan dan dengan partisipasi politik adalah kedewasaan elit politik yang berdemokrasi sejatinya untuk kemajuan negara salah satu penentunya yang turut ambil dalam kegiatan warganegara atau kegiatan politik yang disebut partisipasi politik. Kedewasaan berdemokrasi merupakan bekal penting dalam pemilihan legislatif, partisipasi elit politik yang membentuk perilaku yang menerima kekalahan dengan santun, yang ikut ambil bagian dalam pemberian suara dan lain sebagainya merupakan kondisi penting untuk mewujudkan pertumbuhan bangsa dan negara. Dalam penulisan ini salah satu kegiatan yang di ikuti adalah pemilu legislatif tahun 2019, dan kedewasaan elit politik dalam penulisan ini adalah Kepala Lingkungan, Meweteng, Tokoh Agama, BPD, Pengurus Ranting Partai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2014), yang akan mengkaji kedewasaan elit politik di Desa Sea Satu dalam berpartisipasi pada pemilihan legislatif tahun 2019. Partisipasi politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2009). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sea Satu, maka hasil fokus penelitian adalah keseluruhan hal yang ada hubungannya tentang kedewasaan elit politik dengan partisipasi politik di Desa Sea Satu. Elit politik dalam konteks ini didefinisikan sebagai Kepala Lingkungan, Meweteng, Tokoh Agama, BPD, dan Pengurus Partai.

Menjelang pemilihan umum 2019 umumnya mata publik hanya terfokus kepada pemilihan presiden. Tetapi sebenarnya yang tidak kalah penting di sana juga ada pemilihan legislatif, yakni pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain pemilihan anggota DPR, pemilihan lain yang juga penting adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota Dewan

Pimpinan Daerah (Farouk, 2018). Pemilu legislatif merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu negara dengan memberikan suara secara langsung dalam bilik suara. Pemilu legislatif juga sebagai sarana untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, serta penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo (dalam jurnal Pradana, 2019:198) mengatakan bahwa partisipasi politik oleh masyarakat dari elit politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh dalam kebijakan.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond (dalam Mas'ood, 2011) yakni partisipasi politik konvensional dan non-konvensional, bentuk partisipasi politik konvensional merupakan bentuk yang lazim dapat berupa pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, maupun komunikasi individu dengan pejabat politik administratif. Sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional merupakan bentuk yang tidak lazim berupa pengajuan petisi berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, maupun tindak kekerasan politik.

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson (dalam Suryadi, 2007:137) menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida.

Pemilihan Legislatif tahun 2019 lalu, rakyat Indonesia kembali disuguhkan sebuah pesta demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin dalam lima tahun sekali. Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dasar hukum penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memilih Presiden beserta Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan kedewasaan politik menjadi prakondisi yang diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan demokrasi yang berkualitas. Tanpa kedewasaan politik, demokrasi akan mengalami pengkerdilan (Mariana, 2008).

Dalam literatur mengenai sikap politik (*political attitude*), keterlibatan politik mencakup di dalamnya minat terhadap politik, *partisanship* (pendekatan dengan partai politik tertentu), dan informasi politik. Dalam studi ini yang dimaksud dengan minat atau ketertarikan pada politik adalah "sejauh mana politik meningkatkan keingintahuan seseorang warga negara untuk tertarik pada politik". Jadi di sini menekankan pada keingintahuan atau ketertarikan pada politik. Dengan adanya ketertarikan itu, ia akan melibatkan diri dalam politik, dalam arti bahwa secara psikologis mendorong seorang warga negara untuk terlibat atau ikut berpartisipasi memilih dalam pemilu. (Rasyid, 2017:86).

Dalam hasil penelitian terkait kedewasaan elit politik dengan partisipasi politik di Desa Sea Satu, menggambarkan beberapa hal sebagai berikut diantaranya :

#### **1. Pengetahuan Dan Pemahaman Elit Tentang PILEG Tahun 2019**

Pengetahuan politik adalah dasar dari perilaku politik seseorang dalam perspektif behavior dan perspektif psikologis. (Nasiwan, 2012:33). Teori behaviorisme menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik seseorang sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya. Tingkah laku psikologis menerjemahkan bahwa dalam tingkah laku politik adalah ia (manusia) bersama kepentingan, tujuan, dan motivasi yang mengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi, dan simbolis (Surbakti, 2010:187). Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, di Desa Sea Satu ditemukan adanya elit politik yang meliputi sejumlah Kepala Lingkungan, Meweteng, Tokoh Agama, BPD, Pengurus Partai dinilai cukup baik namun masih terdapat dalam situasi mengupayakan kedewasaan yang mengakibatkan kesulitan menerima hasil dan kekecewaan dan ada beberapa juga terdapat kemampuan kedewasaan dalam menanggapi dan mencerminkan pengetahuan yang cukup dominan sehingga bisa memilah-milah informasi mengenai politik, partisipasi

politik, perilaku politik, peran dan fungsi anggota legislatif khususnya dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan bersama informan Ibu D.T yang adalah seorang kepala lingkungan yang mengatakan:

*“menurut saya adalah proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan. perilaku politik adalah mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang ideologi dan tingkat partisipasi politik. ya saya mengetahui dan memahami, karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.”*

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, situasi dan kondisi dalam pengetahuan sangat baik mengenai politik, partisipasi politik, perilaku politik, peran dan fungsi anggota legislatif. Untuk menghindari masalah pemerintah juga bekerjasama dengan elit-elit politik untuk menyampaikan informasi-informasi relatif dan efektif terkait pemilu legislatif 2019.

## **2. Fenomena Kekalahan Mantan Calon Legislatif**

### **a. Pengetahuan dan Tanggapan**

Tentang fenomena kekalahan-kekalahan yang terjadi pada situasi pemilihan umum tahun 2019 pada saat kompetisi hal yang lumrah untuk kalah menang dari kandidat calon legislatif, dan sebagian para elit mengetahui informasi-informasi dari media. Berikut hasil wawancara bersama bapak E.W mengatakan bahwa :

*“ya, kalah atau menang biasa, sebagai calon kalau ia kalah selalu ada kekecewaan dan bagi saya kecewa apalagi calon. merasa malu selalu ada dalam pemikiran saya. pengalaman yang saya alami waktu mengusung calon yang ada di desa saya mengalami kekalahan namun saya bisa mendinginkan situasi”*

Penyampaian berbeda lainnya bersama informan Ibu inisial F.L menyebutkan bahwa :

*“ya ada jelas, tidak menang pasti stress sampai ada masuk rumah sakit jiwa lagi. tidak, terima saja kalau mereka menang yah menang. ada reaksi masyarakat yang kalah pasti marah-marah ada ketidakpuasan, cara saya mengatasi hal tersebut saya hanya kasih pengertian dan menerima hasil apa yang sudah ditetapkan sebagai hasil”*

Hal ini disampaikan oleh informan bapak M.S menyebutkan bahwa :

*“ya, tahu alasannya informasi lewat media cetak dan media elektronik. tidak pernah alasannya hasil akhir bukan kita yang menentukan yang terpenting kita harus gunakan hak pilih kita. mengatasi untuk caleg, visi dan misi harus jelas, terukur, serta situasi dan keadaan, dan untuk kesejahteraan rakyat dan mengatasi untuk pemilih, diingatkan yang terpenting kita sudah menggunakan hak pilih, sebagai warga negara”*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, situasi dan kondisi dalam memberikan tanggapan elit berbeda-beda kepada fenomena mantan calon legislatif. Ada elit yang cenderung merasa kecewa dan malu, adapun reaksi masyarakat yang kalah marah-marah karena ada ketidakpuasan namun dapat diatasi, adapun yang terpenting menggunakan hak pilih dan lainnya. Tanpa disadari cenderung kekecewaan adalah hal wajar dalam sebuah pertandingan apalagi elit yang sebagai pengurus partai guna mencapai kemenangan calon kandidat pastinya meluangkan waktu yang cukup banyak dan elit lainnya dengan santai menerima para calon kandidat yang kalah.

### **b. Tanggapan Elit Soal Fenomena Kekalahan Mantan Calon Legislatif**

Berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi kekalahan bagi calon-calon tersebut, tanggapan yang kecewa dan malu, tanggapan tidak siap menerima kekalahan, tanggapan ada yang terima dengan legowo, tanggapan calon legislatif tidak kuat iman, dan tanggapan yang biasa saja.

## **3. Memilih Calon Legislatif Tahun 2019**

### **a. Pemberian Suara (Votting)**

Partisipasi politik selama kegiatan pemberian suara merupakan salah satu puncak kegiatan demokrasi yang dinantikan oleh masyarakat dari elit serta para kandidat. Pemberian suara dalam pemilihan legislatif merupakan keaktifan dan keterlibatan elit dalam pemilihan

umum. Pemilihan calon legislatif tahun 2019 merupakan momentum bagi masyarakat dari elit desa Sea Satu dalam rangka keikutsertaan elit pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 yang dimana sangat antusias untuk berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif tersebut.

Pada pemilihan legislatif tahun 2019, tingkat partisipasi politik elit diukur dari beberapa indikator, salah satunya kedewasaan elit politik dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pemahaman dan pengetahuan elit pada politik, partisipasi politik, fungsi dan peran calon legislatif.

Menunjukkan bahwa adanya partisipasi elit dalam pemberian suara sejalan dengan teori dari Miriam Budiardjo (Anwar Arifin, 2015:78) tentang partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Dalam penulisan ini, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan para elit desa Sea Satu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden beserta DPR, DPRD dan DPD.

#### **b. Pengaruh Pilihan Politik**

Status sosial umumnya bisa mempengaruhi pilihan politik dalam menentukan memilih calon kandidat pemilihan legislatif tahun 2019.

Hal ini disampaikan oleh bapak E.W, pengurus partai mengatakan bahwa :

*“kebetulan sesama pengurus yang saya usung. ya, dikarenakan status sosial-ekonomi cukup memadai dan kebetulan status pendidikan sarjana itu menjadi pilihan. tidak adanya paksaan, karena calon yang di usung adalah satu partai”*

Berbeda dengan pernyataan oleh bapak inisial M.S, bpd mengatakan bahwa :

*“tidak, alasannya memilih sesuai hati nurani, setelah mendengar, memperhatikan, visi dan misi dari calon legislatif (caleg). alasannya setiap warga negara yang baik harus menggunakan hak pilihnya tanpa melihat status sosial.*

Dalam partisipasi politik elit juga memiliki pertimbangan tertentu dalam memberikan haknya pilihnya, dimana ada yang di dasari oleh hati nurani masing-masing, netral memilih dengan sebagai warga negara yang baik menggunakan hak pilih tanpa melihat status sosial, memilih dengan modal kepercayaan, dan pilihan politik masyarakat ataupun pilihan politik elit yang dipengaruhi karena status sosial yang melekat pada elit dan yang paling dominan menentukan pilihan karena dipengaruhi oleh visi dan misi.

Visi dan misi figur calon legislatif biasanya paling dominan menjadi dalam menentukan pilihan politik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaruh figur calon legislatif dari visi dan misinya ternyata masih mampu mempengaruhi elit politik di desa Sea Satu dalam partisipasi politik, tidak hanya mengikuti pelaksanaan dan pemberian suara yang berperan dalam partisipasi politik elit. Namun demikian sosok elit juga memiliki pertimbangan terhadap calon-calon legislatif yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif tahun 2019 lalu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada informan Bapak inisial E.W, salah satunya adalah seorang pengurus partai mengatakan :

*“ya, ini sangat mempengaruhi calon yang kita pilih menyangkut perkembangan pembangunan di daerah terutama di desa kami”*

Demikian juga menurut Bapak inisial M.S, bpd mengatakan bahwa :

*“ya, menurut saya visi dan misi berpengaruh alasannya agar calon legislatif yang kita pilih benar-benar dapat mewakili dan membawa aspirasi kita, sebagai rakyat/pemilih”*

Demikian para elit menunjukkan bahwa visi dan misi dari calon legislatif memiliki pengaruh besar dalam menentukan pilihan politik elit untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Partisipasi politik elit politik di Desa Sea Satu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pemilih yaitu elit yang semakin dewasa dalam perhelatan kompetisi terhadap respon hasil, ini tentu menjadi poin penting. Kedewasaan dan kesadaran politik sudah mulai tumbuh di masyarakat dari elit sehingga elit dapat mengunduh dan memilah informasi pengetahuan yang berguna dari setiap visi dan misi setiap kandidat.

#### 4. Peran Elit Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Elit politik mempunyai peran yang sangat besar, elit diartikan sebagai sekumpulan warga yang biasanya mempunyai kewenangan yang memerintah dan tidak memerintah dalam masyarakat. Salah satu bentuk mewujudkan demokrasi adalah dengan mengadakan pemilihan umum, tentunya dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tentunya membutuhkan berbagai elemen termasuk peran elit dalam mengambil bagian mewujudkan kedewasaan demokrasi.

Mengidentifikasi bagaimana peran elit dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan legislatif tahun 2019. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa peran elit yang memerintah dan tidak memerintah, rata-rata informan mengatakan tujuan yang sama yakni agar dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di desa Sea Satu suara masyarakat dari elit berguna dan bermanfaat untuk Negara lima tahun kedepan, maka hal itu hak suara digunakan. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan oleh informan Ibu inisial F.L Meweteng, desa Sea Satu sebagai berikut :

*“peran saya, mensosialisasikan kepada masyarakat menggunakan hak pilih jangan sampai golput (golongan putih), supaya hak pilih itu berguna”*

Hal senada pernyataan dengan Bapak inisial F.K, selaku tokoh agama mengatakan bahwa :

*“mengikuti semua apa yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan pileg ini, untuk memilih suara hak suara sebagai pemilih dan mensosialisasikan supaya tidak ada yang golput”*

Adapun disampaikan dalam pernyataan Bapak inisial M.S, bpd menyampaikan sebagai berikut :

*“berusaha menjadi contoh atau teladan yang baik dan dengan status sosial yang ada boleh membantu memberikan pencerahan bagi masyarakat”*

Masyarakat disarankan dengan mensosialisasikan menggunakan hak suara dan tidak golput dan elit berusaha menjadi contoh teladan yang baik, wajib memberikan pengertian berpolitik dan partisipasi kepada masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 agar terselenggaranya pemilu yang baik. Dari beberapa pernyataan elit di atas menggambarkan peran serta elit dalam meningkatkan partisipasi politik. Elit dalam perannya melayani masyarakat dengan mengimplementasikan dengan selalu memberi teladan termasuk proses pemilihan legislatif tahun 2019. Dan berkaitan interaksi para elit politik dengan masyarakat tidak membatasi diri, para elit membaur dengan masyarakat meskipun memiliki jabatan-jabatan tinggi di Desa dan selalu memaksimalkan mungkin dalam menjaga sikap kedewasaan dengan masyarakat, berusaha untuk menghadiri undangan dan mensosialisasikan informasi baik yang mendukungnya kegiatan pemilihan legislatif tahun 2019.

#### PENUTUP

Kedewasaan elit politik seperti Kepala Lingkungan, Meweteng, Tokoh Agama, BPD, Pengurus Ranting partai di Desa Sea Satu dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2019 sudah menunjukkan bahwa elit politik mempunyai pemahaman, kesadaran tinggi yang baik serta kesadaran dalam pemberian suara yakni dalam hak kewajibannya, menanggapi fenomena-fenomena dengan siap mengemban peran-peran yang normal dalam kehidupan politik, yaitu yang mengenal hak dan kewajibannya sebagai warganegara terhadap sistem politiknya. Selain itu kedewasaan juga dapat dilihat dari bentuk partisipasi yakni sebagai pengamat, partisipan, dan aktivis. Elit yang sebagai pengamat ditunjukkan dalam bentuk pemberian suara atau menggunakan hak suaranya sebagai pemilih dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Dan elit yang sebagai partisipan ditunjukkan dalam bentuk menjadi pemilih, dan terlibat dalam pemilihan umum. Sedangkan elit yang sebagai aktivis yaitu dalam bentuk menjadi panitia pengurus partai politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Arifin, M. L. (2018). *Nilai-Nilai Edukasi Dalam Kisah Musa-Khidir Dalam Al-Qur'an. Dialektika Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(1), 28-39.
- Astrika, L. A. L. (2014). *Fenomenologi Calon Legeslatif (Caleg) Depresi Karena Kalah Dalam Pemilu*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.

- Baharuddin, T. (2017). *Modalitas Dalam Pemilukada - Bupati Perempuan Pertama Di Sulawesi Selatan*. Lampung: CV. Gre Publishing.
- Budiyono, B. (2019). *Menjaga Etika Dalam Berpolitik*. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 51-60.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Christy Sinulingga, J. (2020). *Strategi Pemenangan Calon Legislatif Etnis Batak Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Jambi Tahun 2019*. (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Darna, N. (2019). *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018*.
- Fadhlain, S., & Sayumitra, A. (2014). *Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh*. *Jurnal Online Universitas Teuku Umar*.
- Farisi, M. (2017). *Sirkulasi Elit Politik Lokal Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Provinsi Jambi*. *JISIP-UNJA Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi*, 1(1), 50-66.
- Julianto, M. A., Jaminie, F., & Prakoso, C. T. (2019). *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Tahun 2015 Di Kelurahan Gunung Tabur Kabupaten Berau*.
- Juri & Suparno. (2020). *Pendidikan & Politik*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Kaelola, Akbar. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Mariana, Dede. (2008). *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal Di Indonesia*. Bandung: API Bandung.
- Mas'oeed, Mochtar. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Momor, B. K., Wilar, W., & Lambey, T. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati*. *Jurnal Politico*, 7(4).
- Mubah, A. S. (n.d.). *Belajar Dari Pemilu Amerika Serikat 2008 Untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Mulyodiharjo, S. (2010). *The Power of Communication*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nasiwan. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Nur, A. (2020). *Urgensi Pendidikan Politik Dalam Menciptakan Pemilu Damai Di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologi Politik)*.
- Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan Ruang Publik Virtual - Literasi, Hoax, Dan Perdamaian*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Pradana, M. Y. A. (2019). *Relasi Sosial Elit Politik Dan Sesepuh Desa Melalui Langgar Di Kabupaten Malang*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181-206.
- Pramono, B. (2020). *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Priangani, A. (2019). *Partai Politik Dan Inkonsistensi Koalisi Dalam Pemilu 2014 Dan 2019*. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 79-88.
- Putra, Dedi Kurniawan Syah. (2012). *Media Dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasyid, S. (2017). *Elit Politik Dan Keterlibannya Dalam Pimilikada Di Kolaka Utara*. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*.
- Respationo, H. S. (2013). *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. Masalah-Masalah Hukum*.
- Setiadi, Elly. M & Kolip, Usman. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Sitepu, A. P. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S.P Varma. (2010). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suleman, Z. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia - Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Usman, N. N. (2015). *Percepatan Dan Perlambatan Demokrasi Di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Kompas Gramedia.

#### SUMBER INTERNET LAIN :

1. (Diakses Rabu, 25 November 2020 | 22:17)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kedewasaan>
2. (Diakses Rabu, 25 November 2020 | 22:24)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Partisipasi%20Politik>
3. (Diakses Kamis, 26 November 2020 | 11:50)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elite>
4. (Diakses Senin, 04 Januari 2021 | 16:20)  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Elite>
5. (Diakses Jumat, 08 Januari 2021 | 15:47)  
<https://news.detik.com/kolom/d-4551589/ketakterjaminan-popularitas-dalam-pemilu-2019>
6. (Diakses Selasa, 02 Maret 2021 | 15:29)  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4500702/kenapa-caleg-rentan-stres-jika-tidak-terpilih-dalam-pemilu>
7. (Diakses Selasa, 02 Maret 2021 | 17:10)  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia)
8. (Diakses Selasa, 16 maret 2021 | 16:42)  
<https://www.kpu-minahasakab.go.id/berita-329-rekapitulasi-dan-penetapan-hasil-penghitungan-perolehan-suara-pemilu-2019-di-kabupaten-minahasa.html>
9. (Diakses Selasa, 16 Maret 2021 | 17:45)  
<https://intisari.grid.id/amp/031700724/banyak-caleg-stres-karena-gagal-terpilih-benarkah-faktor-biaya-jadi-pemicunya>
10. (Diakses Kamis, 18 Maret 2021 | 20:39)  
<https://www.manadolive.co.id/dirno-jangan-terjebak-maraknya-baliho-bendera-parpol-justri-tidak-menaikkan-elektabilitas/>
11. (Diakses Rabu, 02 Juni 2021 19:32)  
<https://news.detik.com/kolom/d-3940990/pemilu-legislatif-untuk-indonesia-yang-lebih-baik>
12. (Diakses Jumat, 08 Januari, 2021 15:47)  
<https://news.detik.com/kolom/d-4551589/ketakterjaminan-popularitas-dalam-pemilu-2019#top>
13. (Diakses Selasa, 18 Mei 2021 18:48)  
<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/beritabojonegoro/kedewasaan>
14. (Diakses Rabu, 19 mei 2021 14:19)  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sikap>
15. (Diakses Rabu 19 mei 2021 12:33)  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Emosi>
16. (Diakses Rabu 19 mei 2021 17:15)  
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/03/07/140026469/definisi-kekuasaan-menurut-para-ahli>
17. (Diakses Kamis 20 mei 2021 20:21)  
<https://m.mediaindonesia.com/opini/75990/pentingnya-kedewasaan-berpolitik>
18. (Diakses 17 Mei 2021 22:22)  
<https://www.nu.or.id/post/read/105500/pentingnya-kedewasaan-dalam-berpolitik>
19. (Diakses 9 Juni 2021 18:30)  
<https://id.glosbe.com/la/id/pars>
20. (Diakses 9 Juni 2021 18:30)  
<https://id.glosbe.com/la/id/capere>
21. (Diakses 9 Juni 2021 18:37)  
<https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/participate>
22. (Diakses 9 Juni 2021 18:37)  
<https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/participation>
23. (Diakses 9 Juni 2021 18:39)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Partisipasi>
24. (Diakses 9 Juni 2021 18:41)

- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Polis>
25. (Diakses 9 Juni 2021 19:49  
<https://id.glosbe.com/la/id/eligere>
26. (Diakses 9 Juni 2021 19:54)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Elite>
27. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>